

**PEMBANGUNAN INDUSTRI PENAMBANGAN DAN PENGOLAHAN
PASIR BESI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN
EKONOMI WILAYAH
(Studi Di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Ndaru Sukmono Aji
Pama Denma Akmil Magelang
Email: purwoko8684@gmail.com

ABSTRACT

Mining industry and iron-bearing sand in Kulonprogo Regency area was a mining project with large budget investment, namely Rp. 5.4 – 6 trillions, Working Contract area 2,987.79 hectares, and 2,100 people workers. The purpose of this research was to found out the iron-bearing and industry development in Kulonprogo Regency and its implication on economic resilience of region development at Kulonprogo DIY. The research was conducted with qualitative descriptive method and the collected data of the field observation and questionnaire for the respondents based on the purposive sampling method. Mining industry and iron-bearing sand processing implication on economic resilience at Kulonprogo Regency area was conducted by recruiting workers, entrepreneur's chance, and land compensation payment, agricultural production harvest and its infrastructure. Local government gained profit from tax, retribution, royalties, regional development budget, community developing budget therefore the regional revenue increasing.

Keywords: *Development, Maining and Iron-Bearing Sand Processing, Economic Resilience of Region.*

ABSTRAK

Industri penambangan dan pengolahan pasir besi di wilayah Kabupaten Kulonprogo merupakan proyek penambangan dengan investasi dana yang besar, yaitu Rp 5,4 sampai dengan 6 triliun, dengan luas wiayah Kontrak Karya 2.987,79 hektare, dengan kebutuhan tenaga kerja sejumlah 2.100 orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembangunan industry pasir besi di kabupaten kulon progo dan bagaimana implikasinya dalam pengembangan ketahanan ekonomi wilayah di Kulon Progo DIY. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif dan data diperoleh dengan observasi lapangan dan menggunakan kuesioner yang dibagikan pada responden yang ditentukan berdasarkan metode purposive sampling. Industri penambangan dan pengolahan pasir besi berimplikasi terhadap ketahanan ekonomi di wilayah Kabupaten Kulonprogo dengan cara menyerap tenaga kerja, memberi peluang usaha dan ganti untung terhadap tanah, hasil produksi pertanian dan infrastruktur di atasnya. Pemerintah daerah mendapatkan keuntungan melalui pajak, restribusi, royalti, dana pengembangan wilayah, danapengembangan masyarakat sehingga pendapatan asli daerah meningkat.

Kata Kunci: *Pembangunan, Penambangan dan Pengolahan Pasir Besi, Ketahanan Ekonomi Wilayah.*

PENGANTAR

Latar Belakang

Persaingan di bidang perekonomian di dunia semakin ketat, tidak terkecuali dengan Indonesia yang berupaya meningkatkan kemampuan di bidang ekonomi dengan berbagai cara. Bidang industri dan pertambangan dipercaya cukup efektif untuk meningkatkan pendapatan negara dengan signifikan. Banyak provinsi atau kabupaten dan kabupaten kota yang memacu sektor ekonomi di daerahnya dengan menggiatkan bidang industri dan pertambangan. (Hasibuan, 1993; Yusandhy, 2009). Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah banyak wilayah kabupaten maupun kabupaten kota memaksimalkan potensi alam untuk dapat meningkatkan pendapatan daerahnya, salah satu daerah adalah Kabupaten Kulonprogo.

Kulonprogo merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ibukotanya adalah Wates. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di timur, di selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, di sebelah barat dengan Kabupaten Purworejo, dan di sebelah utara dengan Kabupaten Magelang. *Kulonprogo* dalam Bahasa Jawa artinya sebelah barat Sungai Progo. Kabupaten Kulonprogo terbentuk pada tanggal 15 Oktober 1951, yang sebelumnya wilayah Kulonprogo terbagi atas dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Kulonprogo yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten Adikarta yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman.

Perekonomian Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2011 menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,95%, dibandingkan tahun 2010

sebesar 3,06%, maka laju pertumbuhan tahun 2011 meningkat 1,89 poin. Angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan pendapatan perkapita Kabupaten Kulonprogo, terus mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp.3.547 miliar, tahun 2011 sebesar Rp.3.867miliar.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- (1) mengetahui bagaimana pembangunan industri pasir besi di Kabupaten Kulon Progo
- (2) mengetahui bagaimana implikasinya dalam pengembangan ketahanan ekonomi wilayah di Kulon Progo DIY

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif dan data diperoleh dengan observasi lapangan dan menggunakan kuesioner yang dibagikan pada responden yang ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling*.

PEMBAHASAN

Industri Penambangan Dan Pengolahan Pasir Besi

Salah satu indikator perkembangan kemajuan dan kemakmuran suatu daerah adalah banyak tidaknya investasi yang masuk di daerah tersebut, karena dengan adanya investasi maka dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusinya, selain itu dampak yang akan timbul ada-lah akan membuka serta meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga akan menggerakkan perekonomian masyarakat yang diharapkan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan (Ferry, 2010).

Kulonprogo mempunyai sumber daya alam berupa pasir besi yang tersebar di

wilayah pesisir, potensi pasir besi tersebut apabila dimanfaatkan dengan baik akan sangat memberikan manfaat terhadap Pemerintahan Daerah dan masyarakat Kulonprogo itu sendiri, upaya untuk memanfaatkannya dengan kebijakan pengembangan kawasan pantai selatan Kabupaten Kulonprogo.

Dalam rangka pengelolaan sumber daya mineral pasir besi di Kulonprogo, pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri ESDM melakukan penandatanganan Kontrak Karya dengan PT. Jogja Magasa Iron (JMI) yang akan melakukan penambangan dan pemrosesan pasir besi di wilayah pesisir Kabupaten Kulonprogo pada tanggal 4 Nopember 2008.

Tahap eksploitasi dapat dilaksanakan dengan syarat dilakukan FS (*Feasibility Study*) atau studi kelayakan, dimana ada 3 analisis kelayakan, yaitu analisis teknik, analisis ekonomi dan analisis lingkungan termasuk kemasyarakatan (AMDAL). Rencana pembangunan pabrik pasir besi ini juga telah dikaji dari segi kelayakan teknik dan ekonomi seperti disampaikan oleh staf Dinas perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulonprogo. Analisis kelayakan lingkungan telah dilakukan atas kerjasama PT JMI dan pemerintah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yang pada tahun 2011 sebesar rp. 64,99 miliar (BPS Kabupaten Kulonprogo, Kulonprogo Dalam Angka tahun 2012) memberikan ijin kepada PT. Jogja Magasa Iron untuk melakukan penambangan dan pengolahan pasir besi menjadi pig iron, sehingga meningkatkan nilai tambah pasir besi yang selama ini dijadikan lahan garapan pertanian.

Kendala Yang Dihadapi

Kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan pabrik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: pertama, kendala yang berasal dari perusahaan penambang dan pengolah pasir itu sendiri, dan kedua, yang berasal dari masyarakat sekitar.

Kendala yang pertama terdiri dari: (1) Tenaga profesional. Hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan pegawai PT. Jogja Magasa Iron, perusahaan masih kekurangan tenaga profesional, hal tersebut didukung oleh pengalaman peneliti pada saat akan melakukan pertemuan dan wawancara dengan staf PT. JMI, untuk mendapatkan surat balasan perijinan memerlukan waktu lebih dari satu bulan. Pada saat kunjungan ke lapangan juga terdapat hambatan masalah tata tertib untuk masuk kawasan pertambangan, yang sebenarnya menurut peneliti hanya kurangnya perhatian dari personel yang mendapat tugas mengenai aturan tentang memasuki kawasan pertambangan. (2) Hubungan kerja dengan masyarakat. Faktor yang sangat mempengaruhi usaha penambangan dan pengolahan pasir besi di Kabupaten Kulonprogo adalah banyaknya penolakan dari masyarakat di wilayah yang akan digunakan lahannya untuk area penambangan pasir besi, sehingga kegiatan pekerja sering mengalami kendala karena masih adanya demonstrasi dari masyarakat yang tidak setuju. Peneliti melihat bahwa terdapat pegawai dari perusahaan yang terkesan berperilaku eksklusif dibandingkan penduduk setempat, sehingga tidak mendapat simpati dari masyarakat.

Kendala yang kedua terdiri dari: (1) Masyarakat yang tidak setuju. Masyarakat di wilayah Kabupaten Kulonprogo mempunyai dua pendapat yang berbeda, satu pihak

menyetujui tentang penambangan pasir besi dengan pertimbangan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pihak lain menolak, dengan alasan akan merusak lingkungan dan merampas tanah garapan. Masyarakat yang tidak setuju juga mendapat informasi bahwa terdapat daerah bekas tambang yang tidak direklamasi, sehingga mereka ketakutan apabila daerahnya akan terjadi seperti daerah lain yang tidak direklamasi tersebut. Alasan yang tidak setuju dengan adanya pembangunan pabrik masih tentang rusaknya lingkungan setelah penambangan selesai, karena masyarakat juga mengetahui di beberapa lokasi bekas penambangan di daerah lain, ditinggalkan begitu saja oleh penambang tanpa proses reklamasi yang baik.

(2) Penghasilan menjadi petani lebih besar. Pabrik penambangan dan pengolahan pasir besi yang berdiri di Desa Karangwuni Kabupaten Kulonprogo ini menjanjikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penduduk wilayah sekitarnya. Pekerja akan diberikan gaji dengan besaran di atas upah minimum provinsi, atau upah minimum kabupaten, tetapi berdasarkan wawancara dengan bapak Subhan, Kabag Umum Desa Karangwuni, besaran upah tersebut belum cukup besar jika dibandingkan dengan hasil panen petani jika berhasil panen dengan sukses dan harga yang memadai.

(3) Kepentingan politik. Kondisi sosial dan keamanan di wilayah selatan Kabupaten Kulonprogo mengalami gejolak dengan adanya pendirian sebuah perusahaan yang besar di wilayah Desa Karangwuni Kecamatan Wates Kabupaten Kulonprogo. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan politik untuk mencapai tujuannya. Pemilihan kepala desa di sepanjang pantai selatan Kabupaten

Kulonprogo selalu memunculkan isu tentang pasir besi, baik yang pro maupun kontra.

(4) Sumber daya manusia. Data BPS Kulonprogo menunjukkan bahwa pencari kerja di Kabupaten Kulonprogo sebagian besar masih lulusan SLTA/sederajat ke bawah, sehingga untuk menjadi karyawan pabrik penambangan dan pengolah pasir besi dengan tingkatan tersebut akan kesulitan menduduki jabatan dengan penghasilan yang tinggi. Perusahaan juga akan mengalami kesulitan untuk mencari tenaga kerja ahli pada bidang pertambangan dan pengolahan pasir besi.

(5) Undang-undang dan peraturan pemerintah. Seluruh undang-undang dan peraturan tentang penambangan pasir besi tidak muncul dengan mudahnya, Menurut Direktur PT Jogja Magasa Iron, perlu proses yang sangat lama untuk mendapatkan ijin dari pemerintah dalam menambang dan mengolah pasir besi di Kabupaten Kulonprogo. Pada Awal rencana penambangan, pemerintah belum menyetujui adanya penambangan pasir besi, karena masih diperhitungkan keuntungan dan kerugiannya. Dampak lingkungan pada saat penambangan maupun pasca tambang, sehingga undang-undang maupun peraturan tentang penambangan dan pengolahan pasir besi ini dibahas dalam waktu yang lama.

Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah

Implikasi pembangunan industri penambangan dan pengolahan pasir besi terhadap ketahanan ekonomi wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut:(Sunardi, 1997)

Pertama, implikasi investasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Investasi sebesar Rp 5,4 sampai dengan 6 triliun berarti bahwa perubahan tenaga kerja yang diserap diharapkan lebih besar dari perubahan

investasi. Dampak investasi dari pengolahan pasir besi ini sangat luas, mulai dari dampak langsung (pajak, royalti, dana pengembangan wilayah, dana pengembangan masyarakat, kesempatan bekerja, peningkatan daya guna lahan) sampai dengan dampak yang tidak langsung (kesempatan berusaha lebih luas, industri hilir) akan meningkatkan ketahanan ekonomi di Kabupaten Kulonprogo.

Secara rinci implikasi pertama tersebut tampak pada: (1) Sumber daya alam. Sumber Daya Alam berupa pasir besi yang tersebar di wilayah pesisir Kabupaten Kulonprogo, selama ini wilayah tersebut menjadi lahan pertanian oleh warga setempat, dan sebagian lagi merupakan lahan yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Potensi pasir besi tersebut apabila dimanfaatkan dengan baik akan sangat memberikan manfaat terhadap Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat dan masyarakat Kulonprogo itu sendiri. (2) Sumber daya manusia. Pada tahun 2011.

Jumlah pencari kerja di Kabupaten Kulonprogo sebanyak 7.269 orang. (BPS. Kulonprogo Dalam Angka 2012). Dari data tersebut, maka dengan berdirinya pabrik penambangan dan pengolah pasir besi ini akan dapat meningkatkan kesempatan bekerja di sektor pertambangan dan juga menyerap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kulonprogo. (3) Kesempatan bekerja. Pembangunan pabrik pasir besi ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar terutama di sektor tambang dan penggalian. (4) Kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu (1) Bekerja pada saat pembangunan konstruksi pabrik. Dalam tahap konstruksi ini akan dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana serta pengadaan peralatan

dan perlengkapan untuk persiapan kegiatan penambangan, reklamasi, pengolahan dan pemrosesan pasir besi menjadi konsentrat sampai dengan pig iron. (2) Bekerja di pabrik pada saat pabrik sudah beroperasi. Kebutuhan pekerja untuk pelaksanaan proses penambangan pasir besi dan reklamasi diperkirakan mencapai 600 orang. (5) Peluang usaha yang berkembang. Usaha lain yang dapat berkembang dengan modal yang tidak terlalu besar seperti pada kegiatan sektor jasa /pasokan material, jasa transportasi sewa kendaraan, kendaraan umum yang dibutuhkan baik untuk angkutan manusia atau barang, sektor perdagangan (kebutuhan sehari-hari), jasa kebersihan, makanan, jasa catering, bahan makanan dan minuman untuk keperluan karyawan/pekerja, jasa administrasi fotokopi, jasa terjemahan, percetakan, pemantauan lingkungan jasa pemantauan perkembangan sosial, properti jasa sewamenyewa rumah, pertokoan, mini market, perbengkelan, badan keuangan dan koperasi.

Kedua, implikasi investasi terhadap peningkatan ekonomi wilayah. Kekayaan alam di Kabupaten Kulonprogo yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal berupa bijih pasir besi. Pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta akan mengeksploitasi bahan tambang ini dan diharapkan dapat memberikan keuntungan di semua pihak termasuk penduduk terutamanya di wilayah Kabupaten Kulonprogo. Secara rinci implikasi yang kedua tersebut tampak pada: *Pertama*, Pajak dan royalti kepada pemerintah. Secara umum jika dilihat dari keuntungan yang diperoleh pemerintah pusat maupun pemda dan masyarakat apabila penambangan dan pabrik pengolahan pasir besi ini terwujud dapat dihitung adanya investasi sebesar \$ US

600 miliar atau sekitar Rp 5,4-6 triliun, apabila nilai jual besi kasar (*pig iron*) yang merupakan produk kasar diasumsikan US \$ 550,-/ton, kurs 1 \$ US adalah Rp 9.500,00 dan rencana produksinya 1 juta ton setiap tahun, maka akan memberikan pendapatan kepada pemerintah (berdasarkan PP No: 45 tahun 2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak) adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah pusat, mendapatkan beberapa keuntungan berupa pajak, penghematan subsidi import bahan tambang, royalti. (2).Pemerintah daerah operasional secara langsung mendapatkan keuntungan: pajak, redistribusi, royalti, dana pengembangan wilayah Pemda Kulonprogo dan dana pengembangan masyarakat (3) Daerah operasional tidak langsung mendapatkan keuntungan berupa: royalti, peluang usaha, masing-masing kabupaten/kota di DIY(4) Masyarakat mendapatkan beberapa keuntungan yaitu: peluang kerja dan usaha, peningkatan pendapatan, ganti untung terhadap tanah tumbuh, hasil produksi pertanian, infrastruktur di atasnya, kepada yang berhak dengan harga yang layak dan wajar berdasarkan kemufakatan antara *investor* dengan petani/penggarap/pemilik yang benar-benar berhak dan disaksikan oleh pemkab/aparat pemerintah yang terkait. (data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulonprogo).

Kedua, produksi samping pengolahan *pig iron*. *Pig Iron Plant* (PIP) PT. JMI dirancang untuk menghasilkan sekitar 1.000.000 ton *pig iron* setiap tahun sebagai produk utama. PIP juga menghasilkan slag yang kaya akan kandungan *Titanium* dan *Vanadium* yaitu slag *titaniferous* sekitar 800.000 ton setiap tahun dan slag *Vanadium* sekitar 4000 ton setiap

tahun. (3) Peningkatan ketahanan ekonomi wilayah. Berdirinya perusahaan penambangan dan pengolahan pasir besi ini diharapkan akan mampu meningkatkan ketahanan ekonomi di wilayah Kabupaten Kulonprogo. Penyerapan tenaga kerja, peluang usaha dan dampak yang ditimbulkan akan meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan masyarakat, sehingga ketahanan ekonomi wilayah Kabupaten Kulonprogo meningkat dengan melihat peningkatan di parameter gatra ekonomi. Penambahan PAD Kabupaten Kulonprogo dari penambangan pasir besi sebesar: royalti + pengembangan wilayah + dana pengembangan masyarakat = Rp. 50.160.000,00 + Rp 78.375.000.00+ Rp 78.375.000,00 = Rp. 206,910 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk pajak keuntungan dari perusahaan sebesar 30% dari keuntungan x 20% x 60% setiap tahun (Rencana Penambangan dan Pemrosesan Pasir Besi Menjadi *Pig Iron* di Kabupaten Kulonprogo, dokumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Eenergi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulonprogo) tahun 2012). Dilihat dari jumlahnya yang lebih besar dari PAD Kabupaten Kulonprogo saat ini (Rp. 64,99 miliar), akan sangat mempengaruhi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulonprogo.

Ketahanan Nasional sangat dipengaruhi ketahanan ekonomi, terutama pada saat ini, karena kebutuhan manusia yang semakin banyak dan bermacam-macam. Persaingan antar negara juga menjadi salah satu pemicu untuk lebih meningkatkan kemampuan ekonomi suatu negara. Negara yang kuat perekonomiannya akan menjadi negara yang disegani oleh negara lain. Keberhasilan negara untuk meningkatkan ketahanannya

secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa yang juga menjadi faktor yang dipehitungkan negara lain. (Soepandji, 2011)

SIMPULAN

Industri penambangan dan pengolahan pasir besi di wilayah Kabupaten Kulonprogo merupakan proyek penambangan dengan investasi dana yang besar, yaitu Rp 5,4 sampai dengan 6 triliun, dengan luas wiayah Kontrak Karya 2.987,79 hektare. Total sumber daya pasir besi Kulonprogo adalah 605 juta ton, dengan kandungan Fe sekitar 10.8%, dengan kebutuhan tenaga kerja sejumlah 2.100 orang.

Kendala dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kendala dari dalam perusahaan, meliputi terdapat tenaga kerja kurang profesional, dan hubungan kerja dengan masyarakat kurang harmonis. Kendala dari masyarakat sekitar (dari luar perusahaan), meliputi masyarakat yang tidak setuju dengan adanya penambangan pasir besi, sumber daya manusia Kabupaten Kulonprogo, kepentingan politik sebagian orang, memanfaatkan situasi yang tidak kondusif untuk memenangkan kepentingannya, penghasilan menjadi petani lebih besar daripada menjadi pekerja pabrik, kurang-nya dukungan pemerintah melalui undang-undang dan peraturan.

Industri penambangan dan pengolahan pasir besi berimplikasi terhadap masyarakat secara langsung adalah menyerap tenaga kerja, memberi peluang usaha dan ganti untung terhadap tanah, hasil produksi pertanian dan infrastruktur di atasnya. Pemerintah daerah mendapatkan keuntungan melalui pajak, restribusi, royalti, dana pengembangan

wilayah, dana pengembangan masyarakat dengan jumlah yang besar (Rp 206.910 miliar) belum termasuk pajak perusahaan, jumlah tersebut lebih besar dari PAD Kabupaten Kulonprogo tahun 2012 yang sebesar Rp 64,990 miliar. Peningkatan pendapatan daerah akan mendukung meningkatkan ketahanan ekonomi wilayah, akan tetapi ketahanan geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, sosial budaya, politik dan hankam mesih perlu penelitian lebih lanjut.

Pemerintah melakukan pengawasan secara melekat terhadap internal perusahaan dan juga situasi yang berkembang di masyarakat, agar dapat dihindari praktek-praktek yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak tertentu, misalnya praktek percaloan, pemerasan dan lain-lainnya.

Kendala yang dapat menghambat berdirinya perusahaan agar lebih dicermati, baik oleh perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Hubungan yang kurang baik dengan masyarakat, terdapatnya kelompok masyarakat yang masih tidak setuju dengan adanya penambangan pasir besi dan juga terdapat kelompok-kelompok yang sering memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu harus mendapat perhatian khusus, sehingga dapat dicari penyelesaiannya.

Pemerintah daerah harus arif dalam menyalurkan dana yang didapat dari pajak, royalti, dana pengembangan wilayah, dan dana pengembangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan dampak positif dari usaha penambangan dan pengolahan pasir besi. Masalah sosial budaya juga perlu diwaspadai oleh pemerintah dan masyarakat. Pendirian sebuah perusahaan besar di wilayah pedesaan akan merubah suasana di wilayah tersebut, dampak negatif yang mungkin timbul

misalnya kebiasaan hidup mewah, minuman keras, menurunnya sikap peduli terhadap orang lain dan lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo. 2012. *Kabupaten Kulonprogo dalam Angka 2012. Kulonprogo.*

Ferry Fatem. 2010. *Investasi dan Masalah Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Sorong. Tesis, S2 Program Studi Manajemen Ekonomi Pembangunan UGM.*

Hasibuan, N. 1993. *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli dan Regulasi.* Jakarta: LP3ES.

Soepandji, B, S. 2011. *Membangun Kedaulatan Pangan dan Energi Menuju Keamandirian Bangsa,* Naskah Kuliah umum Lemhannas RI.

Yusandhy, F. 2009. *Konflik Penambangan Pasir besi antara Masyarakat, Perusahaan dan Pemerintah Daerah*, *Tesis, S2 Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada.*

Sunardi, RM. 1997. *Teori Ketahanan Nasional.* Jakarta: Hastanas.